

Dr. Lukman Pardede, S.H., M.Pd.
Dewi Lestari Pardede, S.Pd., M.Pd.

PROFESI PENDIDIKAN



PROFESI PENDIDIKAN

Dr. Lukman Pardede, S.H., M.Pd.
Dewi Lestari Pardede, S.Pd., M.Pd.

Penerbit
litnus.

PROFESI PENDIDIKAN

Ditulis oleh:

Dr. Lukman Pardede S.H., M.Pd.
Dewi Lestari Pardede S.Pd., M.Pd.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Juyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Oktober 2024

Perancang sampul: Bagus Aji Saputra
Penata letak: Muhammad Ridho Naufal

ISBN : 978-634-206-266-1

x + 214 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Oktober 2024



Prakata

Bahan kuliah Profesi Kependidikan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan refrensin perkuliahan bagi mahasiswa. Dengan mata kuliah Profesi Kependidikan diharapkan mahasiswa akan memiliki kompetensi melalui pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam kebiasaan berfikir dan bertindak yang relevan bagi seorang guru dalam konseling terhadap siswa, dan bagaimana perannya dalam pengelolaan pendidikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penyusunan buku ajar ini mencoba menyesuaikan dengan materi yang tercakup dalam silabus sehingga isi dan strukturnya telah berbeda dengan sebelumnya. Guru yang profesional dan efektif merupakan kunci keberhasilan proses belajar mengajar.

Maka upaya meningkatkan kualitas guru harus dilakukan dengan secara terus menerus, dengan berdasar antara lain UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknak, UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, juga Permendiknas No. 10 tahun 2009 tentang Setifikasi bagi guru dalam jabatan.

Penyusun menyadari bahwa baik isi dan penulisan buku ini masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Demi penyempurnaan, penyusun tetap menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan

ilmu keprofesian pendidikan dalam rangka memajukan pendidikan nasional kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap melindungi kita semua.

Medan, Oktober 2024

Tim Penyusun



Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	v

BAB I

RANAH PROFESI KEPENDIDIKAN—1

PENDAHULUAN	1
PROFESIONALISME	6
Pendekatan Karakteristik	19
Pendekatan Institusional	21
Pendekatan Legalistik	23

BAB II

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN GURU—25

Pengantar	25
Penyediaan Guru	26
Induksi Guru Pemula	27

Profesionalisasi Guru Berbasis Lembaga	28
Profesionalisasi Guru Berbasis Individu	29
RINGKASAN.....	31

BAB III

PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIR—37

Alasan Esensial	37
Kesamaan Hak atas Pengembangan.....	41

BAB IV

Prinsip dan Jenis Kegiatan Pengembangan—43

Prinsip-prinsip Pengembangan.....	43
Jenis-jenis Kegiatan Pengembangan	45

BAB V

PERAN DAN TUGAS GURU—49

Peran Guru di Sekolah.....	49
Perluasan Peran Guru	52
Tugas Guru	55

BAB VI

PROFESIONALISASI BIDANG KEADMINISTRASIAN PENDIDIKAN—57

Esensi Administrasi Pendidikan.....	57
Administrasi atau Manajemen Pendidikan.....	60
Dua Pendekatan.....	61
Mengukur perkembangan kemampuan staff organisasi	66

BAB VII

Keprofesian Bidang Kepala Sekolah—75

Fungsi Kepala Sekolah	75
Kepala Sekolah sebagai pejabat Formal.....	79
Kriteria Kepala Sekolah	80
Kompetensi Kepala Sekolah No.13 tahun 2007 Standar kompetensi kepala sekolah versi Permen kanggal 17 juli 2007.Tabel 3 dibawah ini.....	82
Persyarata Kepala Sekolah.....	84
Peningkatan Mutu	85

BAB VII

KEPROFESIAN BIDANG KEPENGAWASAN SEKOLAH—89

Jabatan Supervison Sekolah	89
Tugas Pokok Pengawas Sekolah.....	90
Fungsi Pengawasan Sekolah.....	96
Kewenangan Pengawas Sekolah	97
Kompetensi Pengawas Sekolah.....	97
Kualifikasi Pengawas Sekolah	109

BAB IX

PROFESI SUPERVISOR DAN SUPERVISI PEMBELAJARAN—113

Defenisi Supervisi.....	113
Supervisi bukan Inspeksi	115
Tujuan Supervisi	117
Strategi Supervisi dan Supervisor.....	118
Peranan Supervisor Pembelajaran.....	119
Tugas Pokok Supervisor Pembelajaran.....	121

Kelengkapan Administrasi	122
Prinsip Penyusunan Program	125
Tipe tipe Supervisi Pembelajaran Supervisi sebagai inspeksi.....	128
Teknik Supervisi	129
Pendekatan Supervisi Pembelajaran	130
Implementasi Teknik Supervisi Observasi Kelas.....	132

BAB X

PROFESI SUPERVISI KLINIS UNTUK PERBAIKAN PEMBELAJARAN—133

Defenisi Supervisi Klinis	133
Ciri-ciri Supervisi Klinis.....	134
Pembelajaran Supervisi Klinis	135
Urgensi Supervisi Klinis	135
Tujuan Supervisi Klinis	136
Prinsip-Prinsip Supervisi Klinis	137

BAB XI

BIMBINGAN DAN KONSELING—141

Latar Belakang Sejarah Perkembangan	141
Dasar-dasar Filosofi, Sosiologis, dan Psikologis Biologis dari Konseling	143
Konsep dan Pengertian Konseling	146
Orientasi, Prinsip, Azas Pokok dan Kode Etik Konseling....	154
Organisasi Pelayanan Konseling di Sekolah	163
Kerjasama Guru dengan Konselor dalam Layanan Konseling	173

BAB XII

KEPROFESIAN BIDANG KETATALAKSANAAN PENDIDIKAN—191

Esensi Penatalaksanaan Sekolah.....	191
Fungsi Tatalaksana Sekolah	192

BAB XIII

TUGAS KEPROFESIAN UNTUK IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN—195

Pengantar	195
Defenisi dan Prinsip.....	196

BAB XIV

TUGAS KEPROFESIAN UNTUK IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN—197

Pengantar	197
Defenisi dan Prinsip.....	198
Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	200
Pengembangan Silabus	203
Unit Waktu dan Pengembangan Silabus	204
Langkah-langkah Pengembangan Silabus.....	205
Pelaksanaan Penyusunan KTSP.....	207

Daftar Pustaka.....	211
---------------------	-----



BAB I

RANAH PROFESI KEPENDIDIKAN

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dalam bidang pendidikan selama 30 tahun terakhir membawa berbagai masalah berkenaan dengan pengadaan dan pendayagunaan Guru. Meliputi perhitungan kebutuhan, pengadaan dan penyebaran. Masalah penyebaran Guru dan ketidakcocokan latar belakang pendidikan dan penugasan Guru merupakan masalah yang sangat signifikan. Dalam menangani masalah, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui penataran dan pemberian kesempatan tugas belajar. Perubahan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju menuntut profesi Guru menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Perlu dilakukan perbaikan mendasar mengenai arah, pengembangan dan implementasi program kependidikan yang bertumpu pada standar profesional yang seharusnya yang telah ditetapkan, khususnya standar

profesi pendidik. Demikian juga mengenai penempatan, penggajian dan perlindungan karirnya.

Pelayanan pendidikan dalam kehidupan global menuntut standar profesi pendidik. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum NKRI.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (UU No 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Komitmen pemerintah terhadap penjaminan mutu makin kuat ditandai dengan lahirnya UU No 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 14 thn 2005 tentang UU guru dan dosen, dan PP No 19 thn 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.

Pendidik yang telah bersertifikat akan dapat melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik, dan berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial serta pengembangan diri untuk menunjang peningkatan keprofesionalnya.

Pada saat nanti, semua guru baru harus memiliki sertifikat profesi pendidik sebelum diangkat menjadi guru. Sertifikat Profesi pendidik diberikan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi kepada calon pendidik dan pendidik sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan sebagai pendidik setelah lulus uji sertifikasi (kompetensi). Sertifikasi profesi pendidik merupakan proses pengujian kompetensi calon pendidik sebagai dasar pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan sebagai pendidik setelah lulus uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi. .

Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang wajib dimiliki seorang guru didasarkan pada UU RI No. 14 thn 2005 tentang guru dan



BAB II

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN GURU

A. Pengantar

Telah lama berkembang kesadaran publik bahwa tidak ada guru, tidak ada pendidikan formal. Telah muncul pula kesadaran bahwa tidak ada pendidikan mencukupi. Pada sisi lain, guru yang profesional nyaris tidak berdaya tanpa dukungan tenaga kependidikan yang profesional pula. Paralel dengan itu, muncul anggapan jangan bermimpi menghadirkan guru yang profesional, kecuali persyaratan pendidikan, kesejahteraan, perlindungan dan pemertabatan mereka terjamin.

Kesadaran untuk menghadirkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional sebagai sumber daya utama pencerdas bangsa seperti disajikan diatas, barangkali sama tuanya dengan sejarah peradaban pendidikan. Khusus untuk guru, dilihat dari dimensi sifat dan substansinya, setidaknya ada empat ranah (taxonomy) yang tersedia untuk mewujudkan guru yang benar- benar profesional. Keempat ranah dimaksud disajikan berikut ini:

1. Penyediaan guru berbasis perguruan tinggi.
2. Induksi guru pemula berbasis sekolah
3. Profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi
4. Profesionalisasi guru berbasis individu

B. Penyediaan Guru

Berkaitan dengan penyediaan guru, Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang guru telah menggariskan bahwa hal itu menjadi kewenangan lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yang dalam buku ini disebut penyediaan guru berbasis perguruan tinggi. Menurut dua pokok hukum ini, lembaga pendidikan tenaga kependidikan dimaksud adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Guru dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1/D-IV dan bersertifikat pendidik. Jika seorang guru telah memiliki keduanya, statusnya diakui oleh negara sebagai guru profesional. Pada sisi lain, baik UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. 74 tentang guru, telah mengamanatkan bahwa ke depan, hanya yang berkualifikasi S1/D-IV bidang kependidikan dan nonkependidikan yang memenuhi syarat sebagai guru.

Beberapa amanat penting yang dapat disadap dari dua produk hukum ini. Pertama, calon peserta pendidik profesional berkualifikasi S1/D-IV. Kedua, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, sertifikasi pendidik. Keempat, jumlah peserta didik program pendidikan profesi seriap tahun ditetapkan oleh Menteri. Kelima, program pendidikan profesi diakhiri uji kompetensi pendidik. Keenam, uji kompetensi pendidik



BAB III

PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIR

A. Alasan Esensial

Dan pengembangan secara kontinyu. Kegiatan pembinaan dan pengembangan untuk pembelajaran yang efektif, dilakukan atas dasar prakarsa pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggaran satuan pendidikan, asosiasi guru, guru secara pribadi dan lain-lain. Secara umum kegiatan itu dimaksudkan untuk merangsang, memelihara dan meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu belajar siswa.

Penididikan, pelatihan dan pengembangan merupakan proses yang ditempuh guru pada saat menjalani tugas-tugas kedinasan. Kegiatan ini secara beragam dan berspektrum luas dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, sikap, pemahaman dan performasi yang dibutuhkan oleh guru saat ini dan dimasa mendatang. Dibanyak negara saat ini

berkembang kecenderungan-kecenderungan baru dalam diklatbang tenaga kependidikan, terutama tenaga guru.

Kecenderungan-kecenderungan baru dimaksud adalah: 1) Berbasis pada program penelitian. 2) Menyiapkan guru untuk menguji dan mengakses kemampuan praktis dirinya. 3) diorganisasikan dengan pendekatan kolegialitas. 4) Berfokus pada partisipasi guru dalam proses pembuatan keputusan mengenai isu-isu esensial di lingkungan sekolah, dan 5) membantu guru-guru yang dipandang masih lemah pada beberapa aspek tertentu dari kompetensinya. Dengan demikian, di lingkungan pendidikan, kegiatan ini merujuk kepada peluang-peluang belajar (*learning opportunities*) yang didesain secara sengaja untuk membantu pertumbuhan profesional guru. Lebih spesifik, ia dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pribadi, profesional dan sosial guru, bahkan dilakukan sebagai wahana promosi.

Alasan esensial lain diperlukannya pembinaan dan pengembangan guru adalah karakteristik tugas yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ipteks, disamping reformasi internal pendidikan itu sendiri. Secara umum kegiatan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metode-metode praktis (*on-the-job training and development*) dan teknik-teknik presentasi atau metode-metode simulasi (*off-the-job training and development*). Metode-metode praktis terdiri dari pelatihan industri pekerjaan, magang, internsip, asistensip atau penugasan sementara, rotasi jabatan, perencanaan karir pribadi, pelatihan aksekutif, asisten kepenyelaaan (pengarahan, konseling dan monitoring). Teknik-teknik presentasi inforillasi dan metode-metode simulasi meliputi metode kursus formal, pelatihan oleh diri sendiri (pengajaran berprograma, membaca, kursus korespondensi), pelatihan oleh khusus, management games, pusat-pusat asesmen), bermain pecan, presentasi video, pelatihan laboratoris dan metode konferensi.

Ringkasan rambu-rambu umum standar kompetensi guru, disajikan pada tabel 1 berikut ini:



BAB V

PERAN DAN TUGAS GURU

A. Peran Guru di Sekolah

Seperti dijelaskan sebelumnya, guru bermakna sebagai pendidik mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Sejalan dengan itu, guru memiliki peran yang bersifat multi fungsi, lebih dari sekadar yang tertuang pada produk hukum tentang guru, seperti UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan PP No. 74 tentang guru. Mujtahid (2010) mengemukakan bahwa guru berperan sebagai perancang, penggerak-evaluator dan motivasi. Oleh Mujtahid (2010) sebagaimana termuat dalam <http://mujtahid-komunitaspendidikan.blogspot.com> peran guru dalam administrasi sekolah, termasuk madrasah, dideskripsikan seperti berikut ini.

Guru Sebagai Perancang

1. Untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan utama sekolah, maka tugas pembelajaran, menyusun kegiatan mahasiswa, menyusun kebutuhan sarana prasarana dan megestimasi sumber-sumber pembiayaan Operasional sekolah, dan instansi terkait. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, ada beberapa hal Mengerti dan memahami Visi, Misi dan tujuan lembaga sekolah atau madrasah.
2. Guru dapat menjabarkannya kedalam sebuah isi kurikulum dan penciptaan kultur sekolah, serta membangun penguatan kelembagaan yang sehat dan berkualitas. Semua kegiatan itu diadministrasikan sedemikian rupa, sehingga kontinyuasinya tidak mengalami kendala. Menganalisis data yang terkait masalah Tersimpana
3. sistematis, seperti proses rekrutmen siswa, masa orientasi siswa, proses pembelajaran, Mampu mengembangkan program-program penciptaan inovasi sekolah, khususyadi bidang pendidikan dan khusus yang bermanfaat
4. Guru sebagai Penggerak
Guru juga dikatakan sebagai penggerak, yaitu mobilisator yang mendorong dan menggerakkan sistem organisasi sekolah. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, seorang guru harus memiliki kemampuan intelektual dan kepribadian yang kuat. Kemampuan intelektual, misalnya mempunyai jiwa visioner, creator, peneliti, jiwa rasional dan jiwa untuk maju. Kepribadian, seperti wibawa, luwes, adil dan bijaksana, arif dan jujur, sikap obyektif dalam mengambil keputusan, toleransi dan tanggungjawab, komitmen, disiplin, dan lain-lain.

Untuk mendorong dan menggerakkan sistem sekolah yang maju memang dibutuhkan kemampuan brilian tersebut guna mengefektifkan kinerja sumber daya manusia secara maksimal dan berkelanjutan. Sebab, jika pola ini dapat terbangun secara kolektif dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh guru, maka akan muncul perubahan besar dalam sistem manajemen sekolah yang efektif. Melalui cita-cita dan visi besar inilah guru sebagai agen penggerak diharapkan mempunyai rasa tanggungjawab, rasa memiliki, serta rasa ingin memajukan



BAB VI

PROFESIONALISASI BIDANG KEADMINISTRASIAN PENDIDIKAN

A. Esensi Administrasi Pendidikan

Administrasi pada universitas Chicago pernah menulis bahwa didunia ini tidak ada *world than* administration. Tulisannya itu memang mengejutkan banyak orang, mengundang perdebatan sekaligus melahirkan. Pernyataan ini sekaligus mencerminkan kuatnya tuntutan akan sistem administrasi yang dikelola secara professional oleh orang-orang yang professional pula. Kehadiran mereka yang profesional ini akan sangat.

Sering kita menjumpai staf tata usaha kantor atau sekolah memerlukan waktu berjam-jam untuk mencari arsip sebuah surat, karena sistem pengarsipan yang kacau. Orang tua siswa kadang-kadang perlu waktu beberapa hari untuk mendapatkan surat persetujuan pindah anaknya ke sekolah lain, karena tidak ada standar operasi dan prosedur kerja dilihat dari perspektif

waktu. Demikian dibidang keadministrasian pendidikan pun, profesionalisasi harus terus ditumbuh kembangkan.

Seorang guru memerlukan waktu berjam-jam atau mungkin berhari-hari baru mendapatkan dokumer penetapan kenaikan pangkat atau berkala-nya yang terakhir, karena menyimpannya disembarang tempat secara acak. Bahkan, bukan tidak mungkin seorang administrator sekolah memerlukan waktu lama untuk mendapatkan dokumen faksimili sangat penting, yang diterima seminggu lalu dari kantor pusat atau dari rekaman. Inilah bagian dari bukti bahwa pernyataan Albert Lepawsky di atas ada benarnya.

Berbeda dengan institusi yang serba tertib. Dokumen ini di sini dokumen seterusnya. Kesemuanya bisa ditemukan dalam hitungan menit, bahkan detik waktu berjam-jam untuk menemukan dokumen atau arsip tertentu. Bukankah staf satu alat kerja yang nyaris tidak bernilai ekonomis, seperti penggaris, gunting, pisau silet, tali rafia dan sebagainya.

Ketika semua urusan lancar, dia tidak ingat dengan administrasi, apalagi terlambat, dia serta-merta mengatakan bahwa administrasinya tidak beres. Ketika tersusun rapi, pemeriksa kantor katakanlah tatalaksana itu penting akan mengatakan sistem administrasinya tidak munekan banyak pemanehu kepentingan memandan g sangat mungkin hanya cenderung mengingatuangnya, bukan administrasinya.

Jika urusan lancar bukan karena mempersepsi bahwa adminisrasi itu memang harus lancar, tapi uanglah yang memperlancarnya.

Sebelum merumuskan definisi administrasi pendidikan, ada baiknya dirumuskan terlebih dahulu definisi administrasi. Istilah administrasi yang kerap merupakan padanan kata administration, dalam bahasa Inggris. Kata dasarnya adalah *to administrate* yang berarti mengadministrasikan. Istilah lain yang kita kenal serumpun dengan ini yaitu administrating yang berarti pengadministrasian atau keadministrasian. Sangat banyak defenisi administrasi sangat mungkin sebanyak ahli yang merumuskannya. Bahkan begitu bersemangat, seorang penulis atau ahli merumuskan beberapa defenisi administrasi dan diakui sebagai asli miliknya.

Menurut Djam'an Satori (2006, administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan



BAB VII

Keprofesian Bidang Kepala Sekolah

A. Fungsi Kepala Sekolah

Guru

Karena itu, ia harus professional sebagai guru sekaligus sebagai kepala yang berdimensi luas. Kepala sekolah dapat memerankan banyak fungsi, yang orangnya sama, tetapi topinya yang berbeda.

Di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (yang sekarang berganti nama menjadi Kementrian Pendidikan Nasional, Kemendiknas) telah cukup lama dikembangkan paradigma baru administrasi atau manajemen pendidikan, dimana kepala sekolah minimal harus mampu berfungsi sebagai edukator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator disingkat EMALIM. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah, kepala sekolah juga berjiwa wirausaha atau *entrepreneur*

Kepala sekolah sebagai educator

Sebagai edukator kepala sekolah berfungsi menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasihat kepada warga sekolah, memberikan, mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk berbuat serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik. Sebagai edukator, kepala sekolah harus mampu menganalisis pengajaran tim, moving class, pengembangan sekolah bertaraf internasional, kelas unggulan dan mengadakan program akselerasi bagi siswa yang cerdas diatas normal.

Sebagai edukator juga, kepala sekolah perlu berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kinerja guru dan tenaga kependidikan, serta prestasi belajar penataran atau pelatihan untuk menambah wawasannya. Kedua, memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. *Ketiga*, menggunakan waktu belajar secara efektif disekolah dengan cara mendorong guru Kelima, mengoptimasikan ruang kerja guru sebagai wahana tukar pengalaman

Kepala Sekolah sebagai Manajer

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala kependidikan melalui persaingan dalam kebersamaan, memberikan kesempatan keterlibatan seluruh guru dan tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang mengoptimasi dan mengakses sumber daya sekolah untuk mewujudkan visi, misi kerangka pengelolaan sekolah, sebagai manajer keunggulan, mufakat, esatuan, persatuan, antusiasme, keakraban dan asas integritas. Kepala sekolah diwujudkan dengan penyusunan program, mengorganisasikan personalia, memberdayakan guru dan tenaga kependidikan, serta mendayagunakan sumber mampu mendelegasikan tugas, mengalokasikan pekerjaan, menetapkan standar kualitas, memonitor hasil, mengontrol biaya dan lain-lain.



BAB VII

KEPROFESIAN BIDANG KEPENGAWASAN SEKOLAH

A. Jabatan Supervision Sekolah

Fungsi supervisi itu antara lain dilakukan oleh pengawas sekolah yang dalam konteks UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional masuk dalam rumpun tenaga kependidikan. Di dalam Sikdiknas disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, Tenaga kependidikan dimaksud meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustawan, laboran dan teknisi sumber belajar. Jabatan pengawas yang antara lain tugasnya melakukan supervisi sekolah dan orangnya disebut sebagai supervisor sekolah.

Didalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Pengawasan Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas untuk melakukan

pengawasan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis Pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan anak usia dini formal (PAUD), yang dulu sering disebut pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah. Sebagai tenaga fungsional kependidikan, jabatan pengawas selanjutnya dibuat penjenjangan sebagaimana jabatan guru. Dengan demikian jabatan pengawas telah diakui secara resmi sebagai jabatan fungsional. Jabatan tersebut mencerminkan kompetensi dan profesional dalam pelaksanaan tugas sebagaimana jabatan fungsional lainnya.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, pengawas sekolah masuk rumpun guru. Ini berarti produk hukum yang mengatur masalah pengawas dan angka kreditnya seperti disebutkan di atas akan tereduksi dengan sendirinya. Dalam PP No. 74 Tahun 2008 pada prinsipnya “guru” itu ada tiga, yaitu guru, guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan guru dalam, jabatan pengawas. Dengan demikian, pengawasan merupakan jabatan, sedangkan statusnya “tetap” sebagai guru. Dalam No. 74 Tahun 2008 disebutkan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik yang : (1) berpenggalan sebagai guru sekurang-kurangnya pembimbingan dan pelatihan profesional 8 tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun, (2) memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, (3) memiliki sertifikat pendidik, dan (4) melakukan tugas Guru dan tugas pengawasan.

B. Tugas Pokok Pengawas Sekolah

Sebagai tenaga profesional, pengawas sekolah mempunyai tugas yang cukup luas. Nana Sudjana (2006) mengemukakan bahwa tugas pokok pengawas sekolah adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik baik supervisi akademik maupun supervisi managerial.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas menurut Nana Sudjana (2006) minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni:



BAB IX

PROFESI SUPERVISOR DAN SUPERVISI PEMBELAJARAN

A. Defenisi Supervisi

Secara etimologi, istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris “supervision” yang berarti pengawasan. pelaku atau pelaksananya disebut supervisor dan orang yang disupervisi disebut subjek supervisi atau supervisees. Secara morfologis, supervisi terdiri dari dua kata, yaitu Super (atas) dan vision (pandang, lihat, tilik, amati dan awasi). Supervisi, karenanya diberi makna melihat, melirik, memandangi, memilik, mengawasi, atau mengawasi dari atas. pelakunya disebut supervisor, yang kedudukannya lebih tinggi atau di atas orang-orang yang disupervisi. makna etimologis ini selalu dalam tafsir hubungan antar subjek, sehingga tidak berlaku untuk supervisi pabrik, supervisi kerusakan jalan, supervisi bangunan, supervisi taman sekolah dan sebagainya.

Secara semantik atau per defenisi, istilah supervisi dirumuskan oleh banyak para pakar seperti berikut ini. Kimball Wiles_incrunciuskan supervisi sebagai bantuan pengembangan situasi belajar agar lebih assistance in the development of a better teaching situation”, Adam dan Dickey supervisi sebagai pelayanan khususnya menyangkut perbaikan proses belajar mengajar.

Secara lebih komprehensif dibandingkan dengan rumusan diatas,hoardinan et al. merumuskan bahwa, supervisi adalah salah satu usaha menstimulir mengkoordinasi dan membimbing secara kontinyu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran, dengan demikian mereka dapat menstimulir dan membimbing pertumbuhan tiap-tiap murid secara kontinyu, sefta mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi moder. Penulis Indonesia, Wilem Mantja (2007)mengemukakan bahwa supervisi dapat didefenisikan sebagai kegiatan supervisor yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar. Dia menjelaskan bahwa ada dua tujuan yang harus terwujudkan oleh supervisi, yaitu perbaikan profesionalisme guru dan peningkatan mutu pendidikan.

Menurut Adams dan Dickey (1959) dalam buku mereka Basic Principle of Supervision, supervisi adalah program berencana untuk memperbaiki pengajaran yang ada hakikatnya adalah perbaikan belajar dan mengajar. Good Carter merumuskan pengertian supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya, dalam memperbaiki pengajaran,termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, dan metode

bahwa supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. McNemney (1951) mendefenisikan supervisi sebagai suatu prosedur memberi arah dan mengadakan penilaian kritis terhadap proses pengajaran. Bagi Burton dan Bruckner (1955), supervisi merupakan



BAB X

PROFESI SUPERVISI KLINIS UNTUK PERBAIKAN PEMBELAJARAN

A. Defenisi Supervisi Klinis

Supervisi klinis adalah bantuan profesional kesejawatan oleh supervisor kepada guru yang mengalami masalah dalam pembelajaran agar yang bersangkutan dapat mengatasi masalahnya dengan menempuh langkah yang sistematis, dimulai dari tahap perencanaan, pengamatan perilaku guru mengajar, analisis perilaku, dan tindak lanjut. Supervisi klinis adalah proses bantuan atau terapi profesional yang berfokus pada upaya perbaikan pembelajaran melalui proses siklikal yang sistematis dimulai dari perencanaan, pengamatan dan analisis yang intensif terhadap penampilan guru dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.

Dari situs www.llh.com.sg diperoleh rumusan supervisi klinis sebagai “A formal process of professional support and learning that enables individual practitioners to develop knowledge and competence, assume responsibility

for their own practice in a wide of situations”. Supervisi klinis merupakan sebuah proses formal berbentuk dukungan profesional dan belajar yang memungkinkan individu praktis mengembangkan pengetahuan dan kompetensi. Serta memegang tanggung jawab bagi tindakan-tindakan praktis pada situasi yang lebih lugas. Borders et al. (1991) merumuskan, “Clinical supervision is the constructio of individualized learning plans of supervises working with clients. “Supervisi klinis adalah kontruksi rencana pembelajaran individual bagi yang disupervisi agar bisa bekerja efektif dengan kliennya.

B. Ciri-ciri Supervisi Klinis

Karenanya, hal itu memerlukan dua keahlian. Pertama, identifikasi masalah. yang disupervisi dapat berpartisipasi sebagai koterapis untuk melakukan Perbedaannya dengan supervisi yang lain adalah prosedur pelaksanaannya selama proses pembelajaran dan kemudian langsung diusahakan perbaikan atas bercirikan seperti berikut ini

1. Bimbingan supervisor pengajaran kepada hubungan/pembantuan, bukan hubungan perintah atau instruksi guru bersifat keterampilan yang paling penting merupakan hasil diskusi bersama
2. Instrumen supervisi klinis dikembangkan dan disepakati bersama antara guru dengan supervisor
3. Guru melakukan persiapan dengan mengidentifikasi aspek kelemahan-kelemahannya yang dipandang perlu diperbaiki
4. Pelaksanaannya supervisi klinis selayaknya teknik observasi kelas.
5. Umpan balik atau balikan diberikan dengan segera dan bersifat obyektif.
6. guru hendaknya menganalisis penampilannya
7. Supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan daripada memerintah atau mengarahkan guru.
8. Supervisor dan guru berada atau menciptakan kondisi dalam keadaan atau suasana akrab dan terbuka



BAB XI

BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Latar Belakang Sejarah Perkembangan

Secara histories Bimbingan dan Konseling di Indonesia masuk dan berkembang melalui dunia pendidikan, yang agak berbeda dengan asalnya bimbingan dan konseling (BK) di Amerika yang mulai di masyarakat oleh F.Parson di kota Boston. Kebutuhan BK mulai dari masyarakat karena adanya kebutuhan dan masalah pekerjaan disana saat itu dan baru kemudian dirasakan kepentingan untuk diberikan di dunia pendidikan atau sekolah. Sedangkan di Indonesia,BK mempunyai sejarah sendiri karena masuk melalui dunia pendidikan atau sekolah maka BK dikenal pelayanannya di dunia pendidikan atau sekolah baru melebar atau bergerak ke dunia kerja atau karier dengan gencarnya,Bimbingan dan Konseling Karier di tahim 1984-an setelah Konvensi Bimbingan dan Konseling IPBI ke-5 Hotel Sahid Yogyakarta dilanjutkan dengan Konferensi ARAVAREG ke-5 di Hotel Orchid Jakarta. Jurusan dan Program Studi di sekolah dengan tujuan untuk mencetak Guru Pembimbing. Tidak heran kalau bimbingan

dan konseling lebih kokoh posisinya di dunia pendidikan, apalagi dengan keluarnya UU No. 2/89 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa BK adalah bagian integral dari pendidikan disamping Administrasi Supervisi dan Kurikulum.

Perubahan zaman dan perkembangan ilmu berjalan dengan cepat sehingga Bimbingan dan Konseling tidak hanya dikenal di dunia pendidikan atau sekolah saja karena mulai dirasakan kebutuhan oleh masyarakat adanya layanan ini. Berkembangnya penyuluhan Keluarga Berencana, adanya penyuluhan di bidang pertanian menyebabkan kata penyuluhan menjadi makin melebar, populer dan dimengerti dengan pemahaman agak lain dari Counseling, menyebabkan IPBI dan juga Departemen pendidikan dan Kebudayaan waktu itu untuk mengubah nama Penyuluhan dengan Konseling sehingga dengan Kurikulum 84,94, dan 2004 dikenal Bimbingan dan Konseling atau BK.

Saat ini kata Bimbingan sudah ditinggalkan disosialisasikan “Konseling” Tugas yang dilaksanakan Konselor adalah Konseling. Sedangkan bimbingan yang digunakan dalam UU No.20 tahun 2003 SPN adalah Kata, “Konselor” dan tidak disebut Pembimbing.

Sifat-sifat Konseling diantaranya:

1. Pertolongan diarahkan ke peningkatan kemampuan dalam menghadapi hidup dengan segala persoalannya.
2. Pertolongan yang kontinu diberikan atas dasar perencanaan dan pemikiran ilmiah.
3. akdivitas dan tanggung jawab bersama antar yang menolong dengan ditolong.
4. Patolongan yang isi, bentuk dan caranya disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap masalah.
5. dapat mencapai kehidupan yang layak dan bahagia di dalam masyarakatnya.



BAB XIII

TUGAS KEPROFESIAN UNTUK IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

A. Pengantar

Kepala sekolah, guru dan pengawas sangat banyak berinteraksi dengan kurikulum satuan pendidikan. Mereka ini merupakan tenaga profesional andalan di bidangnya. Kurikulum merupakan seperangkat rencana yang memuat tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai kegiatan pembelajaran tertentu. Kurikulum yang dikembangkan saat ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Istilah yang lebih cocok sesungguhnya adalah Kurikulum Sekolah, karena satuan pendidikan itu banyak dan beragam. Dengan KTSP berarti Kurikulum disusun oleh satuan pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Pengembangan KTSP oleh guru dan tenaga pendidikan di sekolah yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian .tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas Standar Isi,proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,pengelolaan dan pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional_pendidikan_tersebut, yaitu_ Standar_Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Tujuan Panduan Penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SM/MTs/SMPLB,SMA/MA/MALB, dan SMK/MAK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

B. Defenisi dan Prinsip

Seperti yang dijelaskan diatas kurikulum merupakan rencana yang memuat bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mecapai kegaitan tertentu. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran,kegiatan pembelajaran, indikator, perilaian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.



BAB XIV

TUGAS KEPROFESIAN UNTUK IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

A. Pengantar

Kepala sekolah, guru dan pengawas sangat banyak berinteraksi dengan kurikulum satuan pendidikan. Mereka ini merupakan tenaga profesional andalan di bidangnya. Kurikulum merupakan seperangkat rencana yang memuat tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai kegiatan pembelajaran tertentu. Kurikulum yang dikembangkan saat ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Istilah yang lebih cocok sesungguhnya adalah Kurikulum Sekolah, karena satuan pendidikan itu banyak dan beragam. Dengan KTSP berarti Kurikulum disusun oleh satuan pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Pengembangan KTSP oleh guru dan tenaga pendidikan di sekolah yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian .tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas Standar Isi,proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,pengelolaan dan pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional_pendidikan_tersebut, yaitu_ Standar_Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Tujuan Panduan Penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SM/MTs/SMPLB,SMA/MA/MALB, dan SMK/MAK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

B. Defenisi dan Prinsip

Seperti yang dijelaskan diatas kurikulum merupakan rencana yang memuat bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai kegaitan tertentu. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran,kegiatan pembelajaran, indikator, perilaian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.

Bagi guru dan kepala sekolah, KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dibawah koordinasi dan supervise dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan



Daftar Pustaka

- Aqib,Zainal dan Rohmanto,Elham,2017.*Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*.Bandung CV.Yrama Widya.
- Borders, L. D., Bernard, J.M., Dye, H.A.,Fong, M.L., Henderson,P,&Nance,D.W., 1991. Curriculum Guide for Training Conselor Supervisor:Rationale, Development, and Implementation. Counselor Education and Supervision
- Danim,Sudarwa,(2010),*Otonomi Manajemen Sekolah*, Bandung.CV Alfabeta. Denim,Sudarwan, (2010),*Profesionalisme dan Etika Profesi Guru,Bandung.CV Alfabeta*
- Depdiknas,2005,Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496.
- Depdiknas, 2008. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.
- Departemen Pendidikan Nasional.Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2005-2009.

- Depdiknas,2003.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- Depdiknas,2005.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005tentang.Guru dan Dosen.
- Depdiknas,2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah.Dsjamhur I,dan Muh Surya 1984,*Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*,Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Ekosusilo,Madyo,1998.*Supervise Pengajaran dalam Latar Budaya Jawa*. Sukoharjo:Univet Bantara Press.
- Hasbullah,2016. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta:Rajawali Press.
- Iim Waliman,dkk.,2011.*Sipervisi Klinis (Modul Manajemen Berbasis Sekolah)*. Bandung:Dinas Pendidikan Propvinsi Jawa Barat.
- Keputusan MENPAN Nomor 118/1996 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan AngkaKreditnya. Leddick. G.R. & Bemard, J.M., 1980. *The history of supervision:A Critical Review.Counselor Education and Supervision*,27,186-196.
- Lansbury,R.D 1978.*Professionals and Management*.Internet Akses.
- Mulyasa. W.,2007,*Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mantja, W.,2017. *Profesionalisasi Tenaga Kependidikan: Manajemen Pendidikan danSupervisi Pengajaran*,Malang:Elang Mas.
- Nana Sudjana,dkk.,2016.*Standar Mutu Pengawas*.Jakarta:Depdiknas.
- Sergiovanni, T.J.Dan Starrat, R. J., 1993.*Supervision:Human Perspectives*.New York:McGraw-Hill. Sucipto,2003. *Profesionalisasi Guru Secara Internal. Akuntabilitas Profesi*. Makalah Seminar Nasional.Semarang:Universitas Negeri Semarang.
- Suhardjo. M dan Kamarudin, 2009. *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Semiawan,Cony R. 2003.*Pendidikan Anak Berbakat*.Jakarta:Universitas Negeri Jakarta.

- Sagala, S., 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat. Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. PT. Rakasta Samasta, Jakarta.
- Sudrajadjat, Achmad, 2009. *Peran dan Fungsi Bimbingan Konseling*. Akses Internet.
- Tampubolon, Daulai P. 2021. *Perguruan Tinggi Bermutu Paradigma Baru Manajemen Pendidikan, Tinggi Menghadapi Tantangan Abad 21*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tilaar, H. A. R. 1999, *Profil Guru Indonesia Abad 21 dalam Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang. Indonesia.
- Usman, Moh Uzer, 200, *Profil Guru Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya Wahjosumidjo., 2005. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, PT. Raja Grafindo Persada. Yusufhadi Miarso, 2004. *Menyamai Benih Teknologi Pendidikan* (Jakarta Persada Media, 2004)

Buku Profesi Kependidikan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan refrensin perkuliahan bagi mahasiswa. Dengan mata kuliah Profesi Kependidikan diharapkan mahasiswa akan memiliki kompetensi melalui pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam kebiasaan berfikir dan bertindak yang relevan bagi seorang guru dalam konseling terhadap siswa, dan bagaimana perannya dalam pengelolaan pendidikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penyusunan buku ajar ini mencoba menyesuaikan dengan materi yang tercakup dalam silabus sehingga isi dan strukturnya telah berbeda dengan sebelumnya. Guru yang profesional dan efektif merupakan kunci keberhasilan proses belajar mengajar.

Maka upaya meningkatkan kualitas guru harus dilakukan dengan secara terus menerus, dengan berdasar antara lain UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknak, UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, juga Permendiknas No. 10 tahun 2009 tentang Setifikasi bagi guru dalam jabatan.



PROFESI PENDIDIKAN

litrus. Penerbit



litrasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitrus.co.id
@litruspenerbit
litrasinusantara_
085755971589

Pendidikan

+17

